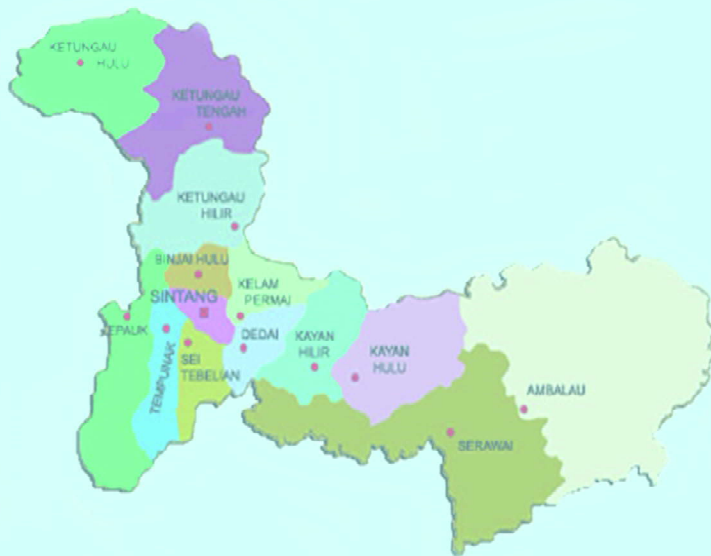


FOKUS

Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar
dan Alumni Universitas Kapuas Sintang



Emiliani Nindy, Petrus Atong

IMPLEMENTASI PELAYANAN PUBLIK

Aida Fitriani

KEBIJAKAN PENANGANAN PEMELIHARAAN JALAN

A.M. Yadisar

ANALISIS PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

Kaja

PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
PEMERINTAH KECAMATAN

Antonius

PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR MELALUI KEBIJAKAN PEMERINTAH
DAERAH DAN KEARIFAN LOKAL

Sopian

STRATEGI PENATAAN RUANG KOTA SINTANG SUATU KONDISI SAAT INI
DAN PEMIKIRAN MASA DEPAN

Kaspama Yuli, Darmansah, Paulus

DISIPLIN KERJA PADA PABRIK MINYAK KELAPA SAWIT

Venny Adhita Octaviani

PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN DAN *WORD
OF MOUTH* MAHASISWA PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI BISNIS

Hermansyah

PENGARUH BAURAN PEMASARAN TERHADAP KEPUTUSAN KONSUMEN

Antonius Erwandi

POLA PEMBINAAN UNIT PEMUKIMAN WARGA TRANSMIGRASI XVIII
KABUPATEN KAPUAS HULU

Nikodimus

STRATEGI KOMUNIKASI KEPALA DESA DALAM MENINGKATAN PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN

Diterbitkan oleh :
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Kapuas

FOKUS

**Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar
dan Alumni Universitas Kapuas Sintang**

E - ISSN 2599 - 3518

Volume 16 Nomor 2, September 2018, hlm. 1 - 114

FOKUS. Terbit dua kali setahun pada bulan Maret dan September. Berisi tulisan yang diangkat dari hasil penelitian dan kajian analitis-kritis di bidang sosial dan politik.

Penyunting Utama

Petrus Atong
M. Kurniawan candra
Abang Zainudin
Kaja
Aida Fitriani

Ketua Penyunting

A.M. Yadisar

Penyunting Pelaksana

Syekh Mochsin
Venny Adhita Octaviani
Paulus
Jhony Fredy Hahury
Imam Asrori
Evy Ratnasari
Hermansyah
Felix Semaun
Darmansah
Antonius
Pether Sobian
Martinus Syamsudin
Markus
Yuliana Fondasoya Lilistian
Mikael Mahin
Yudika Cahyana
Nikodimus

Pelaksana Tata Usaha

Pakaris Subiyakto
Umi SholehaLodovika
Rosnayeti
Florentinus
Tijan

Alamat Redaksi dan Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kapuas
Jl. : Y.C. Oevang Oeray Telp. 0565-22256 Faks. : 0565-22256

Redaksi menerima sumbangan tulisan yang belum pernah diterbitkan dalam media lain. Naskah diketik diatas kertas HVS A4 spasi ganda 1,5 sepanjang kurang lebih 20 halaman. Naskah yang masuk dievaluasi dan disunting untuk keseragaman format, istilah dan tata cara lainnya.

Dicetak oleh Perc. Pelangi Sintang. Isi diluar tanggung jawab percetakan.

FOKUS

**Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar
dan Alumni Universitas Kapuas Sintang**

E - ISSN 2599 - 3518

Volume 16 Nomor 2, September 2018, hlm. 1 - 114

Kata Pengantar

FOKUS, Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, kali ini memulai tampil dalam kemasan baru. Tampilan dan gaya baru bukanlah berarti menafikkan eksistensi dan substansi keilmuan, terutama ranah kajian administrasi publik. Terbitan ke 16 nomor 1, Maret 2018, tentunya banyak harapan dan tantangan yang masih harus dibenahi oleh Tim Penyunting, terutama yang berkaitan dengan isi, dimana edisi Jurnal kali ini belum dapat menyatukan tulisan dalam satu tofik (monograf). Namun demikian, tidaklah berarti mengurangi telaah substansi pembahasan sebuah persoalan keilmuan.

Kritik yang bermanfaat sangat dihargai, namun bukan berarti kritik yang tidak bermanfaat tidak dihargai, hanya barangkali cara menempatkan kritik itu yang berbeda. Sebab semua kritik tentulah bermanfaat terlebih untuk Jurnal FOKUS ini. Semoga Jurnal FOKUS kedepan akan tampil semakin sempurna dan mampu menggugah kesadaran untuk menampilkan tulisan yang sangat erat terkait dengan ruang lingkup Ilmu Administrasi Publik dan mencapai tujuan bernegara yang bermuara pada penyelesaian persoalan publik (masyarakat), tentunya kontribusi yang tidak sebatas ide semata, namun yang sangat utama tentulah aksi-aksi (actions) konkrit.

Penyunting

FOKUS

Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang

E - ISSN 2599 - 3518

Volume 16 Nomor 2, September 2018, hlm. 1 - 114

DAFTAR ISI

IMPLEMENTASI PELAYANAN PUBLIK

Emiliani Nindy, Petrus Atong 1-16

KEBIJAKAN PENANGANAN PEMELIHARAAN JALAN

Aida Fitriani 17-32

ANALISIS PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

A.M. Yadisar 33-40

PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR PEMERINTAH KECAMATAN

Kaja 41-51

PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR MELALUI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DAN KEARIFAN LOKAL

Antonius 52-59

STRATEGI PENATAAN RUANG KOTA SINTANG SUATU KONDISI SAAT INI DAN PEMIKIRAN MASA DEPAN

Sopian 60-65

DISIPLIN KERJA PADA PABRIK MINYAK KELAPA SAWIT

Kaspama Yuli, Darmansah, Paulus 66-72

PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN DAN *WORD OF MOUTH* MAHASISWA PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI BISNIS

Venny Adhita Octaviani 73-82

PENGARUH BAURAN PEMASARAN TERHADAP KEPUTUSAN KONSUMEN

Hermansyah 83-98

POLA PEMBINAAN UNIT PEMUKIMAN WARGA TRANSMIGRASI XVIII KABUPATEN KAPUAS HULU

Antonius Erwandi 99-105

STRATEGI KOMUNIKASI KEPALA DESA DALAM MENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN

Nikodimus 106-114

PERSYARATAN NASKAH UNTUK FOKUS 114-1

FORMULIR BERLANGGANAN 114-2

POLA PEMBINAAN UNIT PEMUKIMAN WARGA TRANSMIGRASI XVIII KABUPATEN KAPUAS HULU

Antonius Erwandi

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Kapuas Sintang

Email : erwandi.unka@gmail.com

Universitas Kapuas Sintang Jln. Y.C. Oevang Oeray No. 92 Sintang, Kalimantan Barat

Abstrak : Pembangunan wilayah yang berkelanjutan. salah satu peranan program transmigrasi yang yang menonjol ialah pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia dan penyaluran potensi sumber daya alam manusia dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pembangunan wilayah. permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah yaitu masih lemahnya sistem pembinaan terhadap warga transmigrasi sehingga belum sepenuhnya dapat mewujudkan sistem pemanfaatan lahan dan dalam rangka mencapai tujuan utama transmigrasi. pemerintah secara berkelanjutan dengan rencana-rencana pembangunan sudah merealisasikan berbagai program pembinaan pada masyarakat yang terutama sesuai dengan kondisi daerah yang secara khusus yaitu pada bidang pertanian dan perkebunan. program pembinaan lainnya yang sudah berjalan yaitu dengan adanya berbagai bantuan permodalan bagi peningkatan usaha kecil dalam upaya pengolahan hasil-hasil perkebunan seperti cokelat dan jagung yang dapat di olah masyarakat menjadi berbagai produk bahan baku makanan.

Kata Kunci: Pembinaan, Pemukiman, Transmigrasi

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan. Secara etimologis pengertian implementasi menurut Wahab (2004:64) “Konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar Webster, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). Implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu (Sunggono 1994:137). Berdasarkan pengertian di atas maka implementasi itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Akan tetapi pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji bahwa implementasi merupakan tindakan oleh individu, pejabat,

kelompok badan pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam suatu keputusan tertentu. Badan-badan tersebut melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemerintah yang membawa dampak pada warga negaranya.

Mazmanian dan Sebatier (dalam Wahab,2004:68) mendefinisikan implementasi sebagai berikut: “Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan”. Proses implementasi ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu seperti tahapan pengesahan undang-undang, Pendapat Anderson (dalam Wahab,2004:68), merumuskan kebijaksanaan sebagai langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seseorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang sedang dihadapi. Oleh karena itu, kebijaksanaan merupakan langkah tindakan yang sengaja dilakukan oleh aktor yang berkenaan dengan adanya masalah yang sedang di hadapi. Lebih lanjut Pengertian implementasi kebijakan menurut Edward III (dalam Pasolong, 2008:11) adalah sebagai berikut: *policy implementation as we have seen is the stage of policy making between the establishment*

of a policy such as the passage of a legislative act, the issuing of an executive order, the handing down of a judicial decision, or the promulgation of a regulatory rule and the consequences of the policy for the people whom it affects.

Jadi implementasi itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Akan tetapi pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat. Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Lester dan Stewart (dalam Winarno, 2002:101-102), menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah: "Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai actor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan". Definisi diatas menekankan bahwa implementasi kebijakan merupakan sesuatu yang dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat dapat berupa Undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan bernegara. Berdasarkan pengertian implementasi kebijakan diatas, menurut George Edward III (dalam Pasolong, 2008:14) mengemukakan beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi, yaitu: komunikasi (*Comunication*), sumber daya (*Resources*), disposisi (*Disposition*), struktur birokrasi (*Bureaucratic Structure*).

Perubahan tata kelola pemerintah dan adanya pandangan masyarakat terhadap pembangunan bidang program ketransmigrasian telah memberikan inspirasi untuk melakukan amendemen Undang-Undang Nomor 15 tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997. Terjadi perubahan pendekatan pembangunan transmigrasi dari pendekatan perpindahan penduduk menjadi pendekatan

pengembangan kawasan, dengan memberikan tanggung jawab yang lebih besar kepada pemerintah daerah dan mendorong peran serta masyarakat. Disamping itu, secara keruangan dikembangkan pendekatan kewilayahan melalui pembangunan Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) atau pembangunan Lokasi Permukiman Transmigrasi (LPT). Upaya pengembangan masyarakat transmigrasi dan kawasan transmigrasi diarahkan untuk mencapai kesejahteraan, kemandirian, integrasi transmigran dengan penduduk sekitar, dan kelestarian fungsi lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan wilayah yang berkelanjutan. salah satu peranan program transmigrasi yang menonjol ialah pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia dan penyaluran potensi sumber daya alam manusia dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pembangunan wilayah. permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah yaitu masih lemahnya sistem pembinaan terhadap warga transmigrasi sehingga belum sepenuhnya dapat mewujudkan sistem pemanfaatan lahan dan dalam rangka mencapai tujuan utama transmigrasi.

Permasalahan penduduk sampai saat ini masih menjadi suatu fenomena yang belum dapat diselesaikan secara cepat oleh pemerintah. Meningkatnya angka pertumbuhan penduduk setiap tahunnya menjadi dilema dalam melaksanakan pemerataan pembangunan di seluruh daerah. Salah satu upaya yang masih dilaksanakan oleh pemerintah dalam konteks pemerataan jumlah penduduk yaitu dengan program-program yang berkenaan dengan pemindahan penduduk baik dalam daerah maupun keluar pulau. Persoalan transmigrasi adalah persoalan menyangkut orang miskin atau masyarakat yang dalam kondisi kemiskinan hal itu dikarenakan ketiadaan lahan dan peluang pekerjaan di daerah asal mendorong masyarakat pindah dan menggantungkan harapannya di daerah tujuan. Dengan berlakunya UU No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, tata cara penyelenggaraan transmigrasi dan pendekatannya mendapatkan tantangan baru dan perlu disesuaikan terhadap tuntutan perkembangan keadaan saat ini. Pelaksanaannya harus memegang prinsip demokrasi, mendorong peran serta masyarakat, mengupayakan keseimbangan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan karakteristik daerah.

Kebijakan dalam berbagai bidang memerlukan adanya proses yang melibatkan berbagai elemen, umumnya kebijakan ditempuh sebagai upaya pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah dan mengurangi adanya kecenderungan yang tidak adil dalam suatu pola dan sistem bahkan dalam masyarakat. Dengan demikian kebijakan tidak dapat dipisahkan dengan pengambilan keputusan yang ditempuh dalam rangka memberikan arah dan tujuan baik dalam konteks suatu program maupun kebijakan sebagai solusi penyelesaian persoalan dalam masyarakat. Sehubungan dengan pelaksanaan program pembinaan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial yang tertuang pada tugas pokok dan fungsinya yaitu : Perumusan kebijakan teknis bidang sosial, tenagakerja dan transmigrasi; Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang sosial, tenagakerja dan transmigrasi; Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang. Sosial, tenagakerja dan transmigrasi; Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi. Secara lebih spesifik tugas pokok dan fungsi dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu akan diuraikan lagi ke dalam tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang sehingga akan memberikan gambaran yang lebih jelas ke arah mana dinas ini akan memposisikan diri untuk berperan serta dalam mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015-2020. Adapun Program Pembinaan di kelola oleh Bidang Transmigrasi yaitu : Penyusunan petunjuk dan teknis pelaksanaan tugas bidang transmigrasi meliputi urusan pengembangan program, pembinaan transmigrasi dan penempatan transmigrasi ; Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan bidang transmigrasi, meliputi urusan pengembangan program, pembinaan transmigrasi dan penempatan transmigrasi. Penyelenggaraan kegiatan bidang transmigrasi meliputi urusan pengembangan program, pembinaan transmigrasi dan penempatan transmigrasi ; Penyelenggaraan pelayanan umum bidang transmigrasi meliputi urusan pengembangan program, pembinaan transmigrasi dan penempatan transmigrasi; Pengendalian kegiatan bidang transmigrasi, meliputi urusan pengembangan program, pembinaan transmigrasi dan penempatan transmigrasi ; Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan pelaksanaan tugas bidang Transmigrasi, meliputi urusan pengembangan program,

pembinaan transmigrasi dan penempatan transmigrasi ; Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai Tugas dan fungsinya. Mengacu pada tugas pokok bidang transmigrasi tersebut pola pembinaan yang dilakukan berupa pembinaan pada warga transmigrasi dalam hal pemanfaatan lahan menjadi perkebunan milik perorangan yang dapat memberikan dampak positif pada perekonomian keluarga, peningkatan kualitas kerajinan dan produksi industri rumah tangga yang sudah berjalan seperti pembuatan berbagai produk makanan berbahan baku dari ubi kayu dan kreatifitas kerajinan rumah tangga lainnya yang dapat dijadikan sumber pendapatan bagi petani. Pola pembinaan tersebut tidak terlepas dari berbagai program kerja pemerintah terutama dalam upaya meningkatkan swasembada pangan dan varietas pangan di daerah.

METODE

Digunakan penelitian deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data Observasi (*Pengamatan*), Wawancara (*Interview*) dan Studi Dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih data mana yang dianggap penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan. Jadi data yang bersifat menyeluruh menyangkut Pola Pembinaan Unit Pemukiman Warga Transmigrasi XVIII Oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Sosial. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Nanga Kalis Kabupaten Kapuas Hulu, selanjutnya diuraikan atau dipecah-pecah menjadi bagian-bagian atau komponen-komponen yang lebih kecil sehingga komponen-komponen itu dapat dibandingkan, diperkirakan dan diperhitungkan dan akhirnya dapat disimpulkan secara objektif dan kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kecamatan Kalis merupakan kecamatan dengan luas wilayah 2519,59 km², setara dengan 8,09% dari luas Kabupaten Kapuas Hulu secara keseluruhan yang mencapai 29.842 km². Dari 17 desa yang ada, desa Rantau Bumbun, Tekudak dan Bahenap merupakan tiga desa yang memiliki luas wilayah terbesar dengan luas masing-masing 295 km² , 276 km² dan 207 km² atau setara dengan 15,65 %, 14,64 % dan 10,98 % dari luas Kecamatan Kalis. Sedangkan desa Semerantau merupakan desa dengan luas

wilayah terkecil di mana luas wilayah desa tersebut 29 km² atau 1,53 % dari luas wilayah Kecamatan Kalis. Fokus pembinaan pada masyarakat transmigrasi yang sedang berjalan yaitu sebanyak 180 kepala keluarga transmigrasi atau sebesar 1.183 jiwa, sedangkan untuk lebih memudahkan pembinaan kelompok tani yang sudah terbentuk sebanyak 6 kelompok tani dan 4 kelompok usaha wiraswasta. Sampai saat ini berdasarkan pelaporan dari profil dati Unit Pemukiman Transmigrasi yang masih diBina (UPT Bina) tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Perencanaan Program Pembinaan

Tahap pembinaan dilakukan perencanaan, karena perencanaan menjadi aspek yang penting untuk terlaksananya kegiatan program pembinaan. Perencanaan yang dilakukan menyangkut pembiayaan, tim pelaksana kerja, waktu kegiatan pembinaan serta laporan administrasi pembinaan. Lebih lanjut di kemukakan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Sosial dalam proses perencanaan oleh pemerintah berkenaan dengan berbagai kegiatan seperti perkebunan atau usaha tani, pemberdayaan dan juga peningkatan pemahaman sosial lainnya agar tidak terdapat kecenderungan di dalam pembauran masyarakat yang kurang. Menjalankan proses pembinaan transmigrasi yang dilakukan berdasarkan pada perencanaan berlandaskan pada administratif yang secara legalitas menjadi keputusan instansi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Sosial tingkat kabupaten. Sedangkan dalam pola perencanaan pembinaan tertib administrasi di harapkan dapat menjadi instrument bagi semua pihak yang terlibat agar dapat secara maksimal melaksanakan sistem perencanaan yang juga merupakan bagian dari aspek pembangunan di daerah pedesaan. Penerapan administrasi yang baik dan mengacu pada ketentuan pemerintah dilakukan untuk menuju pada suatu proses pengambilan keputusan dalam tahapan-tahapan berikutnya yaitu pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pembangunan khususnya dalam tatalaksana pembinaan masyarakat transmigrasi.

Kebijakan program transmigrasi merupakan kebijakan pemerintah pusat dengan bekerja sama pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten sehingga kebijakan dalam program pembinaan pada masyarakat transmigrasi ada yang di alokasikan dari pemerintah pusat dan

propinsi serta kabupaten. Mengacu pada program kebijakan tersebut tentunya berdampak pada perbedaan aspek-aspek dalam pelaksanaannya. Setiap program yang memiliki anggaran dari berbagai sumber tersebut tentunya proses perencanaan tidaklah sama karena pola pertanggungjawaban dari pelaksanaan sangat berlainan. Dalam hal ini perencanaan pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten langsung sehubungan dengan aspek yang sangat substansial dalam masyarakat yaitu peningkatan kualitas kesejahteraan di tempat tujuan oleh sebab itulah pemerintah kabupaten menyelenggarakan program tersebut dengan mengacu pada keadaan yang real terjadi di lapangan.

Memaksimalkan program kerja tersebut pemerintah dengan sangat teliti melaksanakan perencanaan yang secara keseluruhan sudah mencakup berbagai bidang pembinaan. Proses perencanaan pembinaan yang dilakukan dengan berbagai cara yaitu melaksanakan rapat-rapat koordinasi yang sudah di bagi kedalam sistem pengkoordinasian antar lembaga dan untuk kelanjutannya sampai diperoleh keputusan dari hasil-hasil rapat koordinasi tersebut. Selanjutnya yang terpenting bagi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial sistem perencanaan tersebut yaitu mengacu pada pedoman pembinaan, waktu perencanaan disesuaikan dengan rencana pelaksanaan dan sebelum pelaksanaan sudah selesai sepenuhnya untuk di peroleh kepatian pola-pola yang di gunakan selama pembinaannya.

Upaya memaksimalkan peran Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial khususnya yang berkenaan dengan pembinaan warga masyarakat transmigrasi langkah strategis guna mencapai efektifitas harus dilakukan dalam proses perencanaan, keberhasilan suatu program sangat tergantung pada proses perencanaan yang baik dimana sinergisitas antara peran lembaga, dinas dan instansi lainnya menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pengkoordinasian rencana pembinaan sebagai langkah awal dimulai dengan menetapkan beberapa instansi yang terlibat dan menempatkan tim pelaksana pada proses pembinaan serta mengalokasikan seluruh biaya yang tersedia agar dapat mencakup seluruh aspek pembinaan agar terdapat keseimbangan antara pelaku pelaksana pembinaan dan juga sasaran pembinaannya. Dengan demikian pola-pola perencanaan yang baik memiliki berbagai bagian penting yaitu aspek koordinasi yang dapat

dipahami oleh pihak lainnya, pengalokasian dana pembinaan dan juga hasil yang dapat memberikan kontribusi kepada warga masyarakat tersebut.

Terlaksananya program bantuan dan juga pemberdayaan masyarakat di daerah transmigrasi menunjukkan adanya perencanaan dari pihak pemerintah khususnya dari Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial dimana secara teknis pola pembinaan dilakukan tidak saja oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial akan tetapi dilakukan dari beberapa instansi pemerintah yang secara bergantian memberikan berbagai

pembinaan pada masyarakat. pola-pola pembinaan yang terencana tersebut diakui masyarakat cukup membantu dalam proses peningkatan kulaitas pemanfaatan lahan dan juga menunjang terciptanya suatu peningkatan perekonomian dan untuk itu masyarakat berharap agar program pembinaan dapat dilakukan secara berkelanjutan. Dokumen yang berkaitan dengan perencanaan pembinaan yaitu dalam bentuk jadwal pembinaan pada masyarakat transmigrasi, adapun jadwal tersebut dapat dilihat dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 1. Jadwal Perencanaan dan Materi Pembinaan pada Transmigrasi tahun 2016

No	Materi Pembinaan	Waktu Pembinaan
1.	<p>Kebijakan/ Kegiatan pengembangan Usaha Di Kimtrans/Kawasan Transmigrasi dengan Materi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pendekatan pengembangan usaha ekonomi - Matrik Jadwal pengembangan usaha ekonomi - Kegiatan pengembangan usaha ekonomi (T+1) - Kegiatan pengembangan usaha ekonomi (T+2) - Kegiatan pengembangan usaha ekonomi (T+3) - Kegiatan pengembangan usaha ekonomi (T>4) 	Maret 2016 sampai dengan September 2016
2.	<p>Pengembangan Kelembagaan Pemerintahan dan Masyarakat di Permukiman Transmigrasi dengan Materi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Defenisi Pengembangan Kelembagaan - Indikator Keberhasilan - pengembangan kelembagaan organisasi permukiman transmigrasi - Pengembangan kelembagaan pemerintahan desa - Pengembangan pemberdayaan perempuan - Pengembangan pemberdayaan pemuda (karang taruna) 	Rentang waktu April sampai dengan oktober 2016
3.	<p>Program Bantuan pangan dan Kesehatan</p> <ul style="list-style-type: none"> - pembinaan dan pengendalian bantuan pangan -Bimtek Pengelolaan bantuan pangan -Temu teknis pengelolaan bantuan pangan -Rekonsiliasi beras dengan Bulog/Divre Bulog Provinsi 	Rencana Kegiatan Mei Tahun 2016
4.	<p>RAP (Rencana Aksi Perorangan)</p> <p>Upaya peningkatan hasil produksi pertanian melalui kegiatan pemberantasan hama.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan Pertanian - Penyuluhan pembasmian hama 	Rencana kegiatan Juni dan Juli 2016

Sumber : UPT Transmigrasi Kecamatan Nanga kalis tahun 2017

Berdasarkan pada jadwal kegiatan yang telah disusun berdasarkan pada hasil koordinasi dengan kementerian desa, PDt dan Transmigrasi yaitu sesuai dengan materi dari Bimtek pemerintah pusat yang telah diikuti oleh UPT kecamatan Nanga kalis sehingga dalam prosesnya UPT mengalokasikan waktu pelaksanaan dengan menyediakan pedoman bagi pelaksanaan pembinaan. Dalam jadwal perencanaan tersebut tentunya di rencanakan alokasi selama satu tahun karena setiap program pembinaan bersifat berkelanjutan tergantung dari indikator keberhasilan dari pembinaan tersebut.

Pelaksanaan Program Pembinaan

Setiap program kebijakan pemerintah melalui beberapa tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi demikian juga dengan program pembinaan masyarakat transmigrasi yang menjadi program kebijakan pembangunan oleh pemerintah. Seteloah melalui proses perencanaan tahapan berikutnya adalah pelaksanaan program kerja tersebut dan untuk mengetahui sesungguhnya secara mendetail terhadap proses pelaksanaan berikut hasil wawancara dengan subjek penelitian. Setelah selesainya tahapan perencanaan setiap elemen yang sudah di tunjuk berikutnya melaksanakan proses pelaksanaan program kegiatan dan dalam proses tersebut peran Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi tetap sebagai leading sektor sehingga di dalam proses pelaksanaan terlibat secara langsung dilapangan. Berikutnya hasil wawancara yang diperoleh dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Sosial dipaparkan bahwa untuk kegiatan pelaksanaan dilapangan akan disesuaikan dengan apasaja yang sudah direncanakan sehingga jika mengikuti atau mengacu pada perencanaan di harapkan akan maksimal hasil yang dicapai.

Sistem pelaksanaan program lebih mengacu pada sistem pengambilan kebijakan yang menjadi kewenangannya. Penerapan hasil-hasil perencanaan sebagai pedoman kerja menjadi acuan bagi semua pihak yang terlibat akan tetapi dalam kondisi tertentu menyesuaikan dengan kondisi di lapangan dimana setiap aspek pelaksanaan program pembinaan tidaklah langsung dapat diimplementasikan oleh karena peran koordinasi harus dilakukan oleh pelaksana kerja lapangan. Sebagai bagian dari sistem pemerintahan pembangunan terhadap masyarakat di wilayah transmigrasi tentunya berkenaan dengan dinamikan pemanfaatan

berbagai sumber daya alam dan juga berhubungan dengan berbagai dinamika budaya masyarakat setempat dan untuk itulah kebijakan di dalam proses pelaksanaan sangat memungkinkan untuk ditempuh demi terlaksananya program kerja. Tahapan perencanaan pemerintah secara langsung melaksanakan program pembinaan yaitu tahapan implementatifnya yang mana dalam proses implementasi tersebut merupakan tahapan yang sangat menentukan keberhasilan dari tujuan pembinaan pada masyarakat. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya proses pembinaan juga dilangsungkan dan hasilnya sudah terlihat adanya perubahan khususnya ditingkat kehidupan ekonomi masyarakat yang semakin baik. Saat ini menurut Kepala Bidang Transmigrasi merupakan tahapan lanjutan dari pembinaan sebelumnya sesuai dengan hasil-hasil evaluasi bagi keberlangsungan pembinaan yang semakin efektif bagi masyarakat, perbedaannya yaitu terletak pada orientasi dari pembinaan tersebut.

Operasionalisasi program kerja yang telah direncanakan terdapat beberapa aspek pembinaan yang berbeda dari tahun sebelumnya hal itu karena dalam meningkatkan kehidupan masyarakat terdapat hal-hal yang paling urgensi dan sangat menyentuh langsung dengan kehidupan masyarakat. Selain itu program-program pembinaan yang saat ini lebih diarahkan pada kemampuan kemandirian masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya lama yang sudah menjadi pekerjaan utama seperti bidang pertanian. Sejalan dengan perubahan arah perekonomian nasional yaitu penguatan swasembada pangan juga diupayakan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pangan dengan tidak tergantung pada pemerintah dan hal itu sudah dilakukan secara berkelanjutan dalam proses pelaksanaan pembinaan.

Operasionalisasi pelaksanaan dilapangan dilakukan secara bertahap oleh setiap instansi yang ditetapkan menjadi pelaksana pembinaan. Adapun dalam proses tersebut terlihat adanya hambatan-hambatan yang dihadapi yaitu perubahan komoditas di daerah yang cenderung menurun dan juga pengaruh dari kondisi sosial di daerah yang belum dapat memiliki akses pasar yang dapat menampung hasil-hasil perekonomian yang sesuai dengan harapan masyarakat. Hasil observasi juga terlihat bahwa program pembinaan yang berkelanjutan sudah dapat memberikan hasil atau dampak positif pada masyarakat setempat dimana berbagai program bantuan yang

direalisasikan menjadi bagian dari mata pencaharian masyarakat seperti pola peternakan hewan yang dilaskanakan oleh dinas pertanian dan peternakan dibawah koordinasi dengan Dinas Tenaga kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Kapuas Hulu.

Pemerintah secara berkelanjutan dengan rencana-rencana pembangunan sudah merealisasikan berbagai program pembinaan pada masyarakat yang terutama sesuai dengan kondisi daerah yang secara khusus yaitu pada bidang pertanian dan perkebunan. program pembinaan lainnya yang sudah berjalan yaitu dengan adanya berbagai bantuan permodalan bagi peningkatan usaha kecil dalam upaya pengolahan hasil-hasil perkebunan seperti coklat dan jagung yang dapat di olah masyarakat menjadi berbagai produk bahan baku makanan. Dengan demikian dapat di gambarkan bahwa proses pelaksanaan pembinaan tentunya masih berjalan dan terus diupayakan untuk berlangsung secara berkesinambungan untuk menjaga kondisi perekonomian masyarakat walaupun dengan kondisi sosial ekonomi nasional yang masih belum maksimal sesuai dengan harapan. Lahan-lahan pertanian seperti ladang dan perkebunan masyarakat sudah menunjukkan adanya hasil-hasil yang relatif baik. Dengan demikian bantuan penyediaan lahan yang diberikan disertai dengan bantuan sarana dan prasarana pertanian dapat dipergunakan masyarakat secara maksimal. Selain

itu dalam hasil observasi juga terlihat bahwa pembangunan sarana dan prasarana sosial dan kemasyarakatan juga sudah ada disekitar permukiman masyarakat transmigrasi seperti Sekolah Dasar (SD) dan sekolah menengah Pertama (SMP) sarana kesehatan yaitu posyandu dan juga sarana ibadat sesuai agama yang ada dalam masyarakat transmigrasi tersebut.

Kesimpulan dan Saran

Perencanaan program pembinaan dilakukan melalui sistem administrasi secara internal, dengan menetapkan waktu dan jadwal pelaksanaan kegiatan pembinaan dan selanjutnya mengkoordinasikan dengan instansi yang sudah ditetapkan keterlibatannya. Pelaksanaan Program Pembinaan dilakukan mengacu pada perencanaan pembinaan yang dilakukan langsung dilapangan yaitu pada masyarakat seperti distribusi bantuan, alat pertanian dan pembinaan penyuluhan setiap bulan. Saran Penelitian yaitu diharapkan pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu dapat terus melakukan perencanaan pembinaan melalui suatu program yang lebih terpadu pada masyarakat. Diharapkan pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial untuk meningkatkan sistem pelaksanaan pembinaan yang lebih bervariasi dengan melibatkan pihak swasta dalam upaya meningkatkan produktivitas hasil usaha masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 2007. *Prosedur Penelitian*. Jakarta : Rnika Cipta.
- Faisal. 1990. *Observasi Dan Pengumpulan Data*. Bandung: Bumi Aksara.
- Manuwiyoto, Mirwanto 2004. *Mengenal dan memahami Transmigrasi*. Jakarta :Sinar Harapan.
- Nugraha Setaiwan. 1994. *Transmigrasi di Indonesia: Sejarah dan Perkembangannya*. Yogyakarta: Program Studi Kependudukan, Program Pascasarjana UGM.
- Pasolong, Harbani 2008. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta.

- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal.
- Sunggono, Bambang, 1994, *Hukum Dan Kebijakan Publik*, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika,
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Ketransmigrasian
- Wahab, Solichin Abdul, 2004, *Analisis Kebijakan – Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Winarno. B. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Media Presindo.